

BAB I Pendahuluan

**Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2013**

BAB . I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Secara geografis, Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis, karena terletak di tengah-tengah Kepulauan Indonesia. Tentunya dilihat secara ekonomis daerah ini memiliki keunggulan komparatif, dimana Selat Makassar telah menjadi salah satu jalur pelayaran internasional, disamping itu Kota Makassar telah pula ditetapkan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Selain memiliki keunggulan dari letak geografis tersebut, Sulawesi Selatan juga memiliki keunggulan lain dilihat dari sisi etnik budaya, dimana masyarakat Sulawesi Selatan yang terdiri dari berbagai etnik budaya memiliki nilai-nilai luhur yang diangkat dari nilai tradisional dan budaya lokal, dan secara universal dapat dipadukan dengan cara pandang global. Nilai tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu/koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Setidaknya ada tiga etnis besar yang mewarnai nilai-nilai luhur tersebut, yaitu etnis bugis, makassar, dan toraja, serta etnis mandar.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dari setiap keunggulan yang dimiliki dalam mewujudkan tujuan pembangunan, maka kemampuan untuk memadukan secara bijak antara potensi alam yang strategis dengan sumber daya manusia yang telah terbekali dengan nilai-nilai luhur di atas perlu dilakukan. Pengembangan potensi harus selalu direncanakan dengan sebaik mungkin dan dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin melalui berbagai aspek yang saling terkait, saling mempengaruhi dan secara keseluruhan dikelola seoptimal mungkin dan diharapkan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

B. KEADAAN GEOGRAFIS, TOPOGRAFIS, DAN DEMOGRAFIS

1. Geografis

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar terletak pada bagian selatan Pulau Sulawesi memiliki luas wilayah kurang lebih 45.764,53 km², dan seperti yang ditunjukkan melalui tabel-1, bahwa diantara 24 kabupaten/kota yang terdapat di wilayah Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar yakni sekitar 7.502,68 km² atau 16,40 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan, sementara

Tabel - 1
Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota
Di Sulawesi Selatan Tahun 2013

No	Kabupaten / Kota	Luas (Km2)	Persen
1	Luwu utara	7.502,68	16,40
2	Luwu Timur	7.001,61	15,30
3	Bone	4.559,00	9,96
4	Luwu	2.918,65	6,38
5	Wajo	2.516,20	5,50
6	Tana Toraja	2.054,30	4,49
7	Pinrang	1.961,77	4,29
8	Gowa	1.883,32	4,12
9	Sidrap	1.883,25	4,12
10	Enrekang	1.786,01	3,90
11	Maros	1.619,12	3,54
12	Soppeng	1.359,44	2,97
13	Barru	1.174,71	2,57
14	Bulukumba	1.154,67	2,52
15	Toraja Utara	1.151,47	2,52
16	Pangkep	1.112,29	2,43
17	Selayar	903,50	1,97
18	Jeneponto	903,35	1,97
19	Sinjai	819,96	1,79
20	Takalar	566,51	1,24
21	Bantaeng	395,83	0,87
22	Palopo	247,52	0,54
23	Makassar	175,77	0,38
24	Parepare	99,33	0,22
Jumlah 2013		45.764,53	100,00
Jumlah 2012		45.764,53	

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

itu kabupaten/ kota dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Parepare dengan luas sekitar 99,33 km² atau kurang lebih 0,22 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Diantara kabupaten/ kota tersebut, Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah otonom baru di daerah ini, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten ini memiliki luas wilayah kurang lebih 1.151,47 km² atau 2,52 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan.

Secara geografis posisi Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 116° 48' - 122°36' Bujur Timur dan 0° 12' - 8° Lintang Selatan, yang

berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara, Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur. Batas Sebelah Barat dan Selatan masing-masing adalah Selat Makassar dan Laut Flores (tabel – 2).

Tabel - 2
Batas Wilayah Sulawesi Selatan

Sebelah Utara	Sulawesi Barat
Sebelah Timur	Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara
Sebelah Barat	Selat Makassar
Sebelah Selatan	Laut Flores

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

Berdasarkan pengamatan pada tiga Stasiun Klimatologi (Maros, Hasanuddin dan Maritim Paotere)

bahwa selama tahun 2013 rata-rata suhu udara 27.3°C di Kota Makassar dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum di Stasiun Klimatologi Hasanuddin 32.6°C.

2. Topografi

Provinsi Sulawesi Selatan dialiri 67 aliran sungai, dimana sebahagian besar aliran sungai tersebut terdapat di Kabupaten Luwu yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang di daerah ini yaitu Sungai Saddang dengan panjang kurang lebih 150 km dengan melalui 3 kabupaten yakni Kabupaten Tator, Enrekang dan Pinrang.

Selain aliran sungai, daerah ini juga memiliki sejumlah danau yaitu Danau Tempe di Kabupaten Wajo dan Danau Sidenreng di Kabupaten Sidrap, serta Danau Matana dan Danau Towuti di Kabupaten Luwu. Disamping memiliki sejumlah sungai dan danau.

Selain itu, daerah ini juga memiliki 7 buah gunung, dimana Gunung Rantemario dengan ketinggian 3.470 m di atas permukaan laut merupakan yang tertinggi di daerah. Gunung ini berdiri tegak di perbatasan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Luwu.

3. Penduduk

Dengan perkembangan berbagai bidang yang terjadi di Sulawesi Selatan dan memperhatikan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk selama ini, diperkirakan jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2013 mencapai 8.342.200 jiwa atau tumbuh sekitar 1,86 persen pertahun yang berarti bertambah sekitar 150 ribu jiwa lebih dibanding tahun 2012 yang mencapai 8,19 juta jiwa lebih.

Seperti yang ditunjukkan melalui tabel - 3, nampak bahwa hingga tahun 2013

Tabel - 3
Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013

No	Kabupaten/ Kota	Pria (jiwa)	Wanita (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Sex Rasio (Persen)
1	Selayar	60.910	65.955	126.864	92,35
2	Bulukumba	193.424	215.007	408.431	89,96
3	Bantaeng	88.528	94.308	182.836	93,87
4	Jeneponto	172.063	182.535	354.598	94,26
5	Takalar	134.780	145.357	280.138	92,72
6	Gowa	335.790	347.116	682.906	96,74
7	Sinjai	114.791	122.137	236.928	93,99
8	Maros	162.190	169.249	331.439	95,83
9	Pangkep	153.203	164.183	317.386	93,31
10	Barru	82.232	88.920	171.152	92,48
11	Bone	354.159	388.100	742.259	91,25
12	Soppeng	108.669	121.731	230.399	89,27
13	Wajo	189.655	207.125	396.781	91,57
14	Sidrap	137.748	144.851	282.599	95,10
15	Pinrang	176.618	187.104	363.721	94,40
16	Enrekang	99.235	98.042	197.277	101,22
17	Luwu	170.203	174.689	344.892	97,43
18	Tator	116.157	112.532	228.689	103,22
19	Luwu Utara	150.191	148.006	298.198	101,48
20	Luwu Timur	131.363	123.895	255.258	106,03
21	Toraja Utara	113.428	110.964	224.392	102,22
22	Makassar	690.462	704.559	1.395.020	98,00
23	Parepare	66.102	68.396	134.498	96,65
24	Palopo	76.045	79.491	155.537	95,67
	Sulawesi Selatan	4.077.947	4.264.253	8.342.200	95,63

Sumber : Data diolah dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035 Bappenas - BPS RI

penduduk Sulawesi Selatan terkonsentrasi di Kota Makassar yakni kurang lebih 1,39 juta jiwa atau 16,72 persen dari jumlah penduduk Sulawesi Selatan, sementara itu Kabupaten Selayar merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terkecil yakni hanya 126,86 ribu jiwa lebih atau 1,52 persen dari jumlah penduduk daerah ini.

Melihat jumlah penduduk pada kabupaten/kota dan luas wilayah masing-masing daerah, maka nampak bahwa Kota

Makassar merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi yakni 7.936,62 jiwa/km², sementara daerah dengan tingkat kepadatan

terendah adalah Kabupaten Luwu Timur dengan tingkat kepadatan penduduk hanya 36,46 jiwa/km².

C. WILAYAH ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN

Secara administratif, Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 21 kabupaten dan 3 kota, yaitu Kota Palopo, Makassar, dan Parepare. Seperti yang ditunjukkan melalui tabel-4, pada tahun 2013 seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terbagi dalam 310 kecamatan, dan 2.978 desa/kelurahan. Dimana 8,71 persen atau 27 kecamatan berada di Kabupaten Bone. Demikian pula dengan jumlah desa/ kelurahan, 372 desa/ kelurahan atau 12,49 persen juga berada di Kabupaten Bone.

Tabel - 4
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/ Desa
Di Sulawesi Selatan - Tahun 2013

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan		Kelurahan / Desa	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	Selayar	11	3,55	75	2,52
2	Bulukumba	10	3,23	133	4,47
3	Bantaeng	8	2,58	67	2,25
4	Jeneponto	15	4,84	110	3,69
5	Takalar	9	2,90	93	3,12
6	Gowa	18	5,81	167	5,61
7	Sinjai	9	2,90	81	2,72
8	Maros	14	4,52	103	3,46
9	Pangkep	13	4,19	102	3,43
10	Barru	7	2,26	54	1,81
11	Bone	27	8,71	372	12,49
12	Soppeng	8	2,58	70	2,35
13	Wajo	14	4,52	176	5,91
14	Sidrap	11	3,55	116	3,90
15	Pinrang	12	3,87	104	3,49
16	Enrekang	12	3,87	129	4,33
17	Luwu	22	7,10	227	7,62
18	Tator	19	6,13	159	5,34
19	Luwu Utara	12	3,87	171	5,74
20	Luwu Timur	11	3,55	105	3,53
21	Toraja Utara	21	6,77	151	5,07
22	Makassar	14	4,52	143	4,80
23	Parepare	4	1,29	22	0,74
24	Palopo	9	2,90	48	1,61
Jumlah		310	100,00	2.978	100,00

Sumber : Data diolah dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035 Bappenas - BPS RI

D. ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, maka

Tabel - 5
Jumlah Jabatan Struktural Pemprov. Sulsel
(menurut PP.41 Tahun 2007)

No	Uraian	Jumlah
1	Eselon I.b	1
2	Eselon II.a	46
3	Eselon II.b	17
4	Eselon III.a	357
5	Eselon III.b	29
6	Eselon IV.a	994
7	Eselon IV.b	-
Jumlah		1.444

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Sulsel

sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi, hingga tahun 2013 telah ditetapkan 1.444 jabatan struktural dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun gambaran lengkap jabatan struktural tersebut secara lengkap ditunjukkan melalui tabel - 5.

Jumlah jabatan struktural tersebut tersebar pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007

Tabel 6
Jumlah Unit Kerja Lingkup Pemprov. Sulsel
(menurut PP.41 Tahun 2007)

No	SKPD/Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	15
2	Staf Ahli	5
3	Sekretariat DPRD	1
4	Dinas Daerah	19
5	Lembanga Teknis Daerah	26
6	UPT Dinas	99
7	UPT Badan	6
Jumlah		171

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Sulsel

tersebut, hingga tahun 2013 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 171 SKPD/Unit Kerja termasuk didalamnya 105 Unit Pelaksana Teknis Dinas maupun Badan seperti yang ditunjukkan melalui tabel - 6.

2. Satuan Kerja Pemerintah Provinsi

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur. Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah provinsi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, fungsi sekretariat daerah adalah:

- Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Provinsi;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1.) Asisten Pemerintahan.

- Biro Pemerintahan Umum
- Biro Pemerintahan Daerah
- Biro Hukum dan HAM

2.) Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

- Biro Bina Perekonomian.
- Biro Bina Pembangunan.
- Biro Kerjasama.

3.) Asisten Kesejahteraan Rakyat

- Biro Bina Kesejahteraan
- Biro Bina Mental dan Spiritual
- Biro Bina Napza dan HIV/AIDS

4.) Asisten Administrasi

- Biro Organisasi dan Kepegawaian
- Biro Humas dan Protokol
- Biro Umum dan Perlengkapan
- Biro Pengelolaan Aset Daerah.

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Untuk menjalankan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- Fasilitasi rapat-rapat dan peninjauan/kunjungan kerja DPRD;
- Koordinasi penyusunan produk-produk hukum;
- Pelaksanaan urusan RT, ketatausahaan, sarana prasarana, keamanan ketertiban, kepegawaian dan adm. keanggotaan DPRD;
- Penyusunan/perencanaan angg. dan pengelolaan keuangan DPRD;
- Pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat, keprotokolan, pengkajian data dan pengelolaan informasi;
- Fasilitasi penerimaan tamu dan aspirasi masyarakat.

Adapun struktur organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

- Sekretaris DPRD.
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bagian Persidangan.
- Bagian Umum.
- Bagian Keuangan.
- Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Protokol.

c. Dinas-Dinas Daerah

Dinas-dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

No	Dinas	No	Dinas
1	Dinas Kesehatan	11	Dinas Kehutanan
2	Dinas Pendidikan	12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	13	Dinas Koperasi dan UMKM
4	Dinas Sosial	14	Dinas Pengelolaan SD Air
5	Dinas TK dan Transmigrasi	15	Dinas Bina Marga
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	16	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
7	Dinas TP dan Holtikultura	17	Dinas Energi dan SD Mineral
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	18	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	19	Dinas Pendapatan Daerah
10	Dinas Perkebunan		

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Sulsel

melalui Sekretaris Daerah.

Dinas-dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu. Jumlah dinas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 19 dinas seperti yang ditunjukkan melalui tabel – 7.

d. Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain

Lembaga teknis daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah

Tabel - 8
Jumlah dan Nomenklatur Lembaga Teknis Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Lembaga Teknis Daerah	No	Lembaga Teknis Daerah
1	Inspektorat Provinsi	14	Badan Lintas Kabupaten dan Kota
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15	Rumah Sakit Umum Daerah LABUANG BAJI
3	Badan Kepegawaian Daerah	16	RSU Daerah Haji Makassar
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	17	Rumah Sakit Khusus Daerah DADI
5	Badan Kesbang, Politik dan Perlind. Masy.	18	RSK Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah
6	Badan Lingkungan Hidup Daerah	19	RSK Daerah Ibu dan Anak Pertiwi
7	Badan Ketahanan Pangan Daerah	20	RSUD Sayang Rakyat
8	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	21	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	22	Kantor Penghubung Pemerintah
10	Badan Pemberdayaan Masy. Pemdes dan Kel.	23	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
11	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Badan Pendidikan dan Pelatihan	25	Sekretariat Dewan Pengurus korpri
13	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	26	Sek. Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Sulsel

yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah dan lembaga lain

di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 25 buah, dan selengkapnya ditunjukkan melalui tabel - 8.

e. Staf Ahli

Disamping Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat pula kelompok jabatan struktural Staf Ahli dimana sesuai Peraturan Daerah tentang Organisasi Pemerintah Provinsi terdapat 5 (lima) jabatan staf ahli yakni;

- Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
- Staf Ahli Bidang Pemerintahan
- Staf Ahli Bidang Pembangunan

- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
- Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

E. POSISI STRATEGIS PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam kerangka pelaksanaan otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab, oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan strategis dengan harapan Sulawesi Selatan dapat berperan sebagai pusat pelayanan dan pengembangan di Kawasan Indonesia Timur (KIT), disamping untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi untuk menjadi provinsi Sepuluh Terbaik Dalam Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sepanjang periode lima Tahun adalah “Melakukan konsolidasi organisasi internal untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum disertai dengan meningkatkan kadar efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya manusia, keuangan dan peralatan”.

F. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik, dimana sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Stratejik dengan mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan pula program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi. Dan tujuan serta sasaran stratejik tersebut.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja baik kegiatan maupun sasaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama yakni :

Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (DPRD dan masyarakat).

Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2013. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2013.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

G. SISTEMATIKA LAKIP 2013

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2013, yaitu Capaian kinerja (*performance results*) 2013 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan PEmerintah Daerah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

- Bab I **Pendahuluan**,** menjelaskan secara ringkas Profil Provinsi Sulawesi Selatan baik geografis maupun perkembangan hasil-hasil pembangunan disamping menjabarkan pula maksud dan tujuan penyusunan serta penyampaian LAKIP 2013.

- Bab II **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**,** menjelaskan muatan Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2013 dan Rencana Kinerja tahun 2013.

- Bab III **Akuntabilitas Kinerja**,** menjelaskan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian Sasaran Strategik untuk tahun 2013.

- Bab IV **Penutup**,** menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.